

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di 20 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana beberapa desa di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 20 desa dijadikan sampel, dari 20 desa yang dijadikan sampel penelitian terdapat 80 data responden yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki aparatur desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Adanya kemampuan, pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa mampu mendorong peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa untuk lebih baik.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi ketaatan pelaporan dan regulasi yang diberikan oleh aparatur desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Ketaatan yang diberikan oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 akan mempermudah tercapainya asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta asas tertib dan disiplin anggaran.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diterima. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD maka akan berbanding lurus dengan kinerja pengelolaan keuangan desa yang semakin baik. Adanya penyusunan jadwal pengawasan yang rutin dan dilakukan sesuai dengan program, BPD aktif dalam melakukan evaluasi, perbaikan dan penilaian terhadap kegiatan dan program desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran keuangan desa, sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran dan kebutuhan desa dapat terpenuhi.

Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ditolak. Hal tersebut menjelaskan bahwa tinggi rendahnya kualitas SDM dari aparatur desa

tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Diperlukan adanya dukungan dari organisasi melalui pemberian pelatihan dan perhatian berupa *reward* atas pekerjaan atau prestasi yang sudah dilaksanakan, serta dukungan berupa kelancaran arus dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Selain itu, profesionalitas kerja diperlukan dalam semua tindakan dari aparatur desa sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa secara signifikan, faktor tersebut diantaranya kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa. Hal tersebut menggambarkan bahwa tercapainya kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik sangat diperlukan adanya ketiga faktor tersebut. Sesuai hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa khususnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Melihat kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa perlu melakukan peningkatan kualitas pada ketiga faktor tersebut. Peningkatan kapasitas aparatur desa dapat dilakukan melalui penambahan intensitas pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa dan perekrutan aparatur desa dengan pemenuhan kualifikasi yang memadai,

sehingga aparatur desa mempunyai kemampuan, pemahaman dan keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Peningkatan kualitas pengawasan BPD dapat dilakukan dengan cara penyusunan jadwal rutin pengawasan, pengawasan yang dilakukan sesuai dengan program dan dilakukan secara bertahap, BPD aktif dalam melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan dalam kegiatan dan program, dan BPD selalu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan program desa.

Ketaatan pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sistem kerja sesuai dengan asas dan pedoman tata kelola yang baik dalam pemerintahan daerah (*Good Local Government Governance*). Serta menjalankan taat asas sesuai dengan pedoman Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Apabila regulasi-regulasi yang ada dijalankan dengan baik serta didukung dengan pelaksanaan tata kelola yang baik menjadi budaya tertib hukum dan disiplin dalam pengelolaan anggaran

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jangkauan penelitian yang relatif kecil (23 Desa), tidak digunakannya metode wawancara sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail serta variabel penelitian yang relatif sedikit.
2. Sampel penelitian ini dilakukan dalam lingkup satu wilayah kabupaten namun hanya diambil beberapa desa sebagai objek penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil lebih banyak desa atau seluruh desa

di wilayah Kabupaten Lombok Timur supaya dapat digeneralisasi dalam lingkup wilayah yang lebih luas.

3. Kompleksnya tugas aparatur desa dan keterbatasan waktu penelitian menyebabkan jawaban yang diberikan aparatur desa selaku responden dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol secara pasti apakah jawaban responden jujur atau tidak.

#### **D. Saran**

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait kinerja pengelolaan keuangan desa diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cangkupan wilayah yang lebih luas untuk sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variable seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, dll yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara dalam pengambilan data penelitian, sehingga data yang didapatkan lebih detail.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Abdul, Hafiz T. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Andiani, Novi. 2012. *Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah*. Skripsi S-1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan.
- Andriani. W. 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan)* Jurnal Akuntansi & Manajemen, Vol 5 – No. 1. Juni 2010. ISSN 1858-3687. Hal 69-80.
- Ardansyah, 2014. *Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*“. [jurnalmanajemen.petra.ac.id](http://jurnalmanajemen.petra.ac.id) diakses tanggal 11 Juli 2015.
- Ardiansyah, Andhika. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi S-1 Universitas Pasundan Bandung. Diunduh dari: <http://www.digilib.unpas.ac.id>.
- Aristia, Randy. 2015. *Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Hakam Ulu*.
- Avionita, Venni. 2013. :”*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah*”. Jurnal Universitas Widyatama.
- Badan Pengawas Daerah. 2018. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2015-2018.
- Dedi, Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edi, W. S., Trisna, N. H. & Sujana E. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Daerah Kabupaten Buleleng.

- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair et al, 2010. *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Hendri et al. 2016. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengolahan Keuangan Desa Kabupaten Lombok Tengah*. Lombok.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprpto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Istiqomah, Siti. 2013. *Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pengolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro*.
- Khusniyatun, Siti. 2016. *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen*. Kebumen: Salemba Empat.
- Mada, S., Kalangi L., dan Gamaliel H. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi: Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi II*, penerbit Andi. Yogyakarta.
- Munti, F., dan Fahlevi H. 2017. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuh Aceh*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri.

Setyorini, Eka. 2017. *Determinan Minat Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo*.

Siagian, 2013, Manajemen Sumber daya Manusia, Bumi aksara, jakarta.

Suharto, A. A. 2012. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri*. Kediri: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 1, Nomor 3. Universitas Kadiri.